



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 – 2029

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan, Rahmat, taufik, dan karunia-Nya, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini bukan sekadar pemenuhan amanat regulasi, melainkan juga bentuk komitmen kelembagaan dalam menghadirkan arah kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan bagi Kabupaten Seluma.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma yang disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dalam kurun waktu mulai tahun 2025–2029.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra ini dapat menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh jajaran Bapperida dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kuat dalam mengawal terwujudnya pembangunan Kabupaten Seluma emas berlian (elok, maju, adil, sejahtera, berkelanjutan dan beriman).

Seluma, Oktober 2025
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Seluma

SUPARJOH, S.SOS., M.Si.
NIP. 197008061997031005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 8
2.1 Gambaran Pelayanan PD	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis PD	23
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 28
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	28
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	28
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029	 29
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029	 31
 BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 33
4.1 Uraian Program	33
4.2 Uraian Kegiatan.....	35
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	 43
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah	 51
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	 54
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	 56
 BAB VII Penutup	 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi PNS Menurut Jenis Kelamin.....	13
Tabel 2.2 Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.3 Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural.....	13
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional.....	13
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang.....	14
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma.....	15
Tabel 2.7 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024 (juta rupiah).....	17
Tabel 2.8 Realisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (2021-2024).....	18
Tabel 2.9 Asumsi Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma (2025-2029).....	22
Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
Tabel 2.11 Identifikasi Isu-Isu Strategis Bapenda	26
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	30
Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra PD	32
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah	34
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan	37
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	44
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas PD	53
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama	55
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma.....	9
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berorientasi pada hasil, disusun melalui analisis terhadap kondisi internal dan eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dan RPJMD Kabupaten Seluma yang memuat tujuan, dan strategi yang realistis. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah merupakan komitmen yang dibangun untuk digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma. Selain itu Renstra digunakan sebagai pedoman/acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi Kabupaten Seluma “Terwujudnya Kabupaten Seluma Emas Berlian (Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan Dan Beriman)”. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini adalah:

- a. fokus pada upaya mengidentifikasi dan menangani isu-isu strategis yang berkembang dengan sasaran yang dinamis dan berkelanjutan, dalam hal ini berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah; dan

- b. lebih berorientasi pada langkah-langkah program yang bersifat teknis, sistematis dan akuntabel untuk merespon isu-isu strategis yang berkembang terhadap optimalisasi pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Kegiatan dalam tahap penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal
 - a. Penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD Tahapannya mencakup:
 - a) Analisis gambaran pelayanan;
 - b) Analisis permasalahan;
 - c) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d) Analisis isu strategis;
 - e) Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f) Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f) serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

3. Tahap Penyusunan Rancangan

Rancangan Renstra disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah:

- a. Rancangan Renstra dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; dan

- b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir
 - a. Perumusan rancangan akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. Perumusan rancangan akhir Renstra dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
6. Penetapan Renstra
 - a. Rancangan akhir Renstra disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan untuk diverifikasi; dan
 - b. Rancangan akhir Renstra yang telah disempurnakan sebagaimana disampaikan kembali kepada Badan untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma merupakan unsur perencanaan dalam pembangunan desa di Kabupaten Seluma. Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Seluma No 21 tahun 2021 tugas dari pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma melakukan pengaturan, pengendalian dan koordinasi serta merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan wajib pemerintahan sesuai dengan indikator pemetaan urusan pemerintahan di bidang keuangan khusus di bidang pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. RPJMD Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 baru saja disusun, penajaman agar sistematis penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang akan berpengaruh terhadap capaian akhir kinerja utama Pemerintah Kabupaten Seluma.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 – 2029 berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima)

tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma. Tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Seluma. Sehingga tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Seluma.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2006 - 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012–2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 08); dan
19. Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 mempunyai maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dan kondisi yang diinginkan lima

tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Seluma yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029. Hal lain juga yang diharapkan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi;
2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama 5 tahun ke depan;
3. Memberikan Instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029;
4. Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi Kabupaten Seluma;
5. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan penganggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma;
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi uraian tentang stuktur, kondisi dan potensi personal dan sarana/prasarana juga dalam hal kewenangan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Seluma, serta uraian ringkas tentang berbagai isu strategis yang berkaitan dengan bidang Bapenda kabupaten Seluma.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Berisi uraian ringkas tentang tujuan serta sasaran dan kegiatan dari setiap kebijakan, mengungkap mengenai nilai-nilai dasar dan strategi dalam rangka pembangunan Bapenda

Tahun 2025-2029 serta uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma selama kurun waktu 2025 - 2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Berisi dengan Rancangan penggunaan anggaran dana pada program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan dan indikator kinerja utama dalam menyelenggarakan program dan kegiatan. Dimana indikator kinerja utama bertujuan sebagai acuan/tolak ukur dalam menyusun renstra Badan Pendapatan Daerah.

BAB V Penutup

Bab terakhir memuat kesimpulan substantif dari keseluruhan dokumen Renstra, termasuk kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Bapenda.

Dengan sistematika tersebut, diharapkan Renstra Bapenda 2025–2029 dapat memberikan arah yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, baik oleh internal organisasi maupun pemangku kepentingan pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Kedudukan dan Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengaturan, pengendalian dan koordinasi serta merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan wajib pemerintahan sesuai dengan indikator pemetaan urusan pemerintahan di bidang keuangan khusus di bidang pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Fungsi Utama

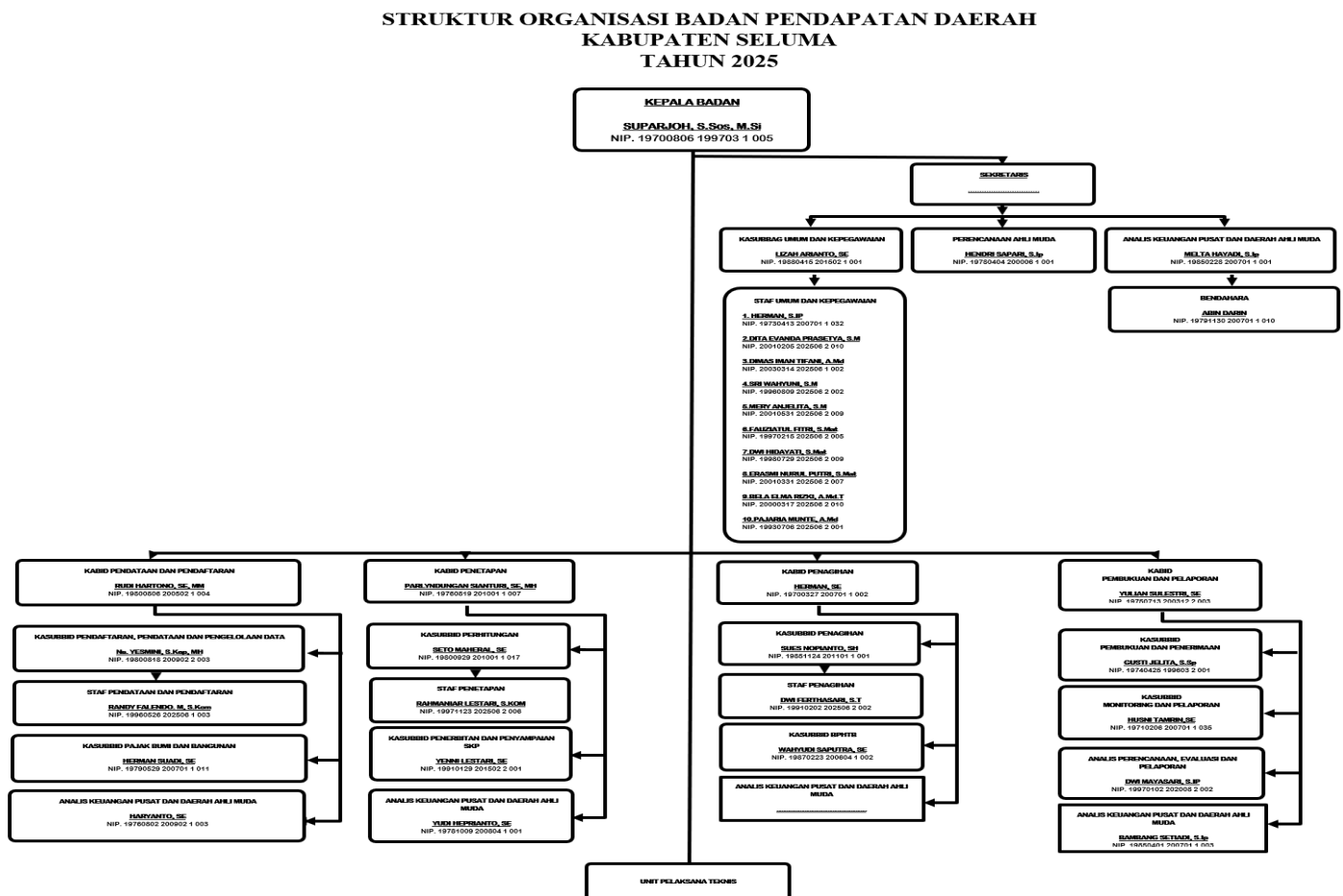
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
- 2) Penyusunan kebijakan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, retribusi Pajak/Bea. Pajak Kendaraan Bermotor, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah
- 5) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan
- 6) Koordinasi program dan kegiatan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 21 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma



Struktur organisasi dan kelembagaan Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma terdiri dari:

1) Kepala Badan

- Pimpinan tertinggi yang mengkoordinasikan seluruh fungsi Bapenda

2) Sekretaris

Sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian.

- Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup urusan umum dan kepegawaian.

- Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan keuangan.

3) Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, membina dan mengevaluasi pendaftaran dan pendataan wajib pajak.

- Subbidang Pendaftaran

Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan pendaftaran lingkup urusan pendaftaran, pendataan dan pengelolaan data.

- Subbidang Penyuluhan dan Dokumentasi

Subbidang Penyuluhan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan dalam kegiatan pendaftaran pajak daerah, melaksanakan pengelolaan data dan informasi wajib pajak daerah, menyimpan arsip surat, panggilan objek/subjek pajak daerah, dan melaksanakan pemeliharaan daftar induk wajib pajak.

- Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan pendaftaran, pendataan dan pengelolaan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4) Bidang Penetapan

Bidang Penetapan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penetapan pajak daerah, membina dan mengawasi penetapan pajak daerah.

- Subbidang Perhitungan
Subbidang Perhitungan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan penetapan dalam kegiatan perhitungan pajak, mencatat hasil perhitungan pajak, membuat nota perhitungan pajak daerah.
- Subbidang Penertiban dan Penyampaian SKP
Subbidang Penerbitan dan Penyampaian SKP sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melakukan penerbitan surat ketetapan pajak daerah, mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan daerah serta dokumen pajak bumi dan bangunan.
- Subbidang Keberatan
Subbidang Keberatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan tugas kegiatan pelayanan keberatan terhadap pajak daerah, menerima, melayani, surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah membuat nota dinas penelitian kembali wajib pajak, menyiapkan keputusan/menerima atau menolak keberatan.

5) Bidang Penagihan

Bidang Penagihan bertugas melakukan penagihan pajak dan memproses keberatan pajak daerah.

- Subbidang Penagihan
Sub Bidang Penagihan bertugas melakukan penagihan, pemunggutan pajak daerah, menyiapkan data surat menyurat dokumen penagihan.
- Subbidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi anggaran penagihan pajak, mengumpulkan data dan mengelola sumber penerimaan pembayaran angsuran.
- Subbidang Angsuran
Subbidang Angsuran sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumber penerimaan daerah di luar pajak daerah, mengumpulkan data dan mengelola sumber penerimaan pajak daerah.

6) Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis di bidang pembukuan dan penerimaan pajak, melaksanakan pelaporan kegiatan pembukuan dan pelaporan penerimaan pajak-pajak daerah, melaksanakan pembinaan pelaporan dan penerimaan pajak daerah.

- Subbidang Pembukuan Penerimaan
Subbidang Pembukuan Penerimaan sebagaimana dimaksud pajak daerah.
- Subbidang Monitoring dan Pelaporan
Subbidang Monitoring dan Pelaporan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan pungutan pajak daerah.
- Subbidang Persediaan dan Dokumentasi
Subbidang Persediaan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok menyediakan media pajak dan retribusi daerah serta mendokumentasikan terkait pengelolaan pendapatan asli daerah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 24 orang PNS, 12 orang CPNS, 6 orang PPPK dan Honorer sebanyak 8 orang yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas-tugas penunjang ASN Lainnya, seperti Penjaga Malam, Cleaning Service (Kebersihan Kantor), dan Pelaksana Tugas Harian Lepas Lainnya.

1) Komposisi Pegawai

Komposisi pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi PNS Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Org)
1	Laki – Laki	24
2	Perempuan	18
	Jumlah	42

Tabel 2.2
Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	6
2	Sarjana (S1)	28
3	Diploma	3
4	SLTA	5
	Jumlah	42

Tabel 2.3
Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	ADUM	-
2	ADUMLA	-
3	SPAMA / DIKLATPIM III	-
4	SPAMEN / DIKLATPIM IV	-
	Jumlah	-

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	Pendidikan / Kursus Bhs. Inggris	-
2	Pendidikan kebendaharaan APBD	3
3	Methodologi Perencanaan	-
4	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	-

5	Pemegang Kas	-
	Jumlah	3

Tabel 2.5

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. 1 (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	2
4	Penata Tk I (III/d)	10
5	Penata (III/c)	7
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
7	Penata Muda (III/a)	9
8	Pengatur Tk. I (II/c)	4
9	Pengatur TK.I (II/b)	0
10	PPPK Golongan IX	2
11	PPPK Golongan V	4
12	Tenaga Honorer (PTT)	8
	Jumlah Keseluruhan	50

b. Sarana Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung meskipun belum memiliki gedung sendiri yang bersifat khusus namun telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6**Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma**

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Histo Meter	1 Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	4 Unit	Baik
3	Kendaraan Roda 2	16 Unit	Baik
4	Brand Kas	1	Baik
5	Kursi Direktur	2	Baik
6	Meja Telpn	1	Baik
7	Meja Biro	1	Baik
8	Lemari Es	1	Baik
9	Laptop	11	Baik
10	Perforator Besar	1	Baik
11	Lemari Kayu	6	Baik
12	Lemari Kayu Lapis	1	Baik
13	Meja Kayu / Rotan (1/2 Biro)	11	Baik
14	Kursi Rapat (polaris)	1	Baik
15	Tabung Pemadam Kebarakan	1	Baik
16	PC, Unit	2 Unit	Baik
17	Notebook	1	Rusak
18	Printer Unit	3 Unit	Baik
19	Hub	1	Baik
20	Wireless	3	Baik
21	Mesin Pelubang	2	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dengan pelayanan publik yang berkinerja tinggi akan memungkinkan peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Badan Pendapatan Daerah merupakan perubahan nomenklatur dari Badan Keuangan Daerah. Dengan berubahnya nomenklatur maka ada penambahan fungsi Perangkat Daerah dengan perubahan yang ada, maka juga berfungsi sebagai koordinator penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya, diantaranya:

- Retribusi Daerah;
- Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain PAD yang Sah.

Terdapat 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, meliputi:

- Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- Makanan dan/atau Minuman
- Jasa Perhotelan
- Jasa Parkir
- Jasa Kesenian dan Hiburan
- Pajak Reklame
- Opsen Pajak

Jenis retribusi yang di koordinir yaitu:

- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perijinan Tertentu

Untuk bisa mengetahui capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah maka perlu dikaji capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma. Namun sebelumnya, kita bisa melihat data penerimaan pajak daerah dalam 3 (Tiga) tahun terakhir dan data retribusi daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir untuk membandingkan capaian target dalam beberapa tahun terakhir baik dalam bentuk nominal maupun persentasenya. Dari

data-data tersebut dapat dilihat indikator awal untuk menilai capaian kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Berikut data disajikan dalam bentuk tabel.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2016-2020 (sesuai Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021) sebagaimana Tabel 2.7 memiliki sasaran strategis yaitu “Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”

Tabel 2.7

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran	57.072	39.552	54.076	66.641	86.238
Realisasi	65.156	36.121	40.006	40.894	22.693

Pada tahun 2020, PAD Kabupaten Seluma memiliki anggaran sebesar Rp57,07 miliar dan berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar Rp65,16 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa di awal periode, pemerintah daerah masih mampu mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber lokal, meskipun tantangan pandemi COVID-19 mulai berdampak pada stabilitas fiskal. Namun, memasuki tahun 2021, realisasi PAD justru mengalami penurunan drastis, hanya mencapai Rp36,12 miliar dari target Rp39,55 miliar. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala struktural dalam pendapatan daerah, baik dari sisi pemungutan pajak dan retribusi maupun dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi.

Tren penurunan realisasi PAD berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, PAD ditargetkan sebesar Rp54,08 miliar, tetapi hanya mampu terealisasi Rp40,01 miliar. Ketidakesesuaian ini semakin melebar pada tahun 2023, di mana target PAD ditingkatkan menjadi Rp66,64 miliar, namun realisasi yang diperoleh hanya Rp40,89 miliar, atau sekitar 61,4% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan target PAD, kondisi di lapangan masih belum memungkinkan pencapaian yang optimal.

Tabel 2.8
Realisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (2021-2024)

TAHUN		JENIS PENDAPATAN			
		Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Pendapatan Transfer
2021	Target	16.485.603.578	990.000.000	22.076.582.830	878.665.250.435
	Realisasi	13.112.334.769	244.347.500	22.829.527.665	861.169.767.758
	Persen (%)	80%	25%	103%	98%
2022	Target	19.065.000.000	4.850.000.000	30.160.835.000	881.844.673.716
	Realisasi	12.487.869.074	713.058.310	26.872.998.840	827.451.595.037
	Persen (%)	65%	14.70%	89.10%	93.83%
2023	Target	20.035.416.305	657.950.310	45.947.665.186	979.296.408.784
	Realisasi	13.089.236.807	882.727.227	27.127.222.201	920.989.764.150
	Persen (%)	65%	134%	59%	94%
2024	Target	44.551.399.640	657.950.310	41.028.696.322	1.075.831.810.059
	Realisasi	11.921.411.282	1.087.887.532	14.887.661.639	1.030.813.967.797
	Persen (%)	26.76%	165.34%	36.29%	100.26%

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma dapat dilihat dalam tabel T-C.2.7 yaitu tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah. Kemudian pada tabel T-C.2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah dapat di lihat pada lampiran.

2.1.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Provinsi Bengkulu. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi, yaitu:

a. Tantangan

Tantangan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma adalah:

- Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah di Kabupaten Seluma, harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal;
- Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu;
- Terbatasnya tenaga / sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma
- Sulitnya menjangkau desa-desa yang infrastruktur, jaringan yang belum memadai
- Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;

- Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang berpeluang berdampak terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Seluma
- Akuntabilitas belanja pemerintah masih perlu perbaikan sehingga dapat menjadi lebih baik dan konsisten
- Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh beberapa dinas/instansi di lingkungan pemerintah Kota Batam yang dalam pelaksanaannya belum optimal.
- Masih terkendalanya pengembangan system penerimaan berbasis IT.

b. Peluang

Di samping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang potensial dan menguntungkan untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, yaitu:

- Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
- Dukungan dari lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Seluma.
- Kondisi sosial di Kabupaten Seluma cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Seluma akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
- Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan dengan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.
- Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat,

sehingga terbentuk pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan publik baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.

- Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- Penerapan Nilai Pasar Tanah sebagai indikator pengenaan BPHTB akan menguntungkan banyak pihak baik masyarakat, Investor maupun Badan Pendapatan Daerah karena terjadi peningkatan harga jual yang berbanding lurus dengan Peningkatan Pajak BPHTB.
- Pendataan semua calon wajib Pajak dan Wajib pajak hingga data tersebut mutakhir dan valid secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
- Kerjasama dengan bank kas daerah serta dilakukan host to host agar proses pembayaran pajak langsung ke bank kas daerah.
- Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat terus membaik.
- Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika di tengah masyarakat dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.
- Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi-potensi pendapatan untuk diintensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrumen tarif maupun pengembangan potensi baru.
- Peraturan perundang-undangan yang memberikan obyek dan potensi penerimaan daerah yang baru.

2.1.5 Asumsi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Sebagai bagian dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, dilakukan estimasi terhadap potensi pendapatan daerah pada periode tahun 2025 hingga 2029. Estimasi ini meliputi berbagai jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, yaitu: Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Barang dan Jasa

Tertentu (PBJT), yang mencakup: PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Hotel, PBJT Parkir, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

Proyeksi pendapatan daerah ini disusun berdasarkan tren pertumbuhan rata-rata tahunan yang berkisar antara 2% hingga 3%. Perhitungan ini mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, potensi optimalisasi penerimaan pajak daerah, kondisi perekonomian daerah, serta kebijakan fiskal nasional.

Asumsi pendapatan pada setiap jenis pajak mengalami kenaikan secara konsisten setiap tahun, mencerminkan optimisme terhadap peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi lokal, serta penguatan pengawasan pemungutan pajak. Rincian lengkap asumsi pendapatan tiap jenis pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Asumsi Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma (2025-2029)

No.	Uraian (Pajak Daerah)	Asumsi Pendapatan Tahun 2025	Asumsi Pendapatan Tahun 2026	Asumsi Pendapatan Tahun 2027	Asumsi Pendapatan Tahun 2028	Asumsi Pendapatan Tahun 2029
1	Pajak Reklame	100,000,000.00	102,000,000.00	104,000,000.00	106,000,000.00	108,000,000.00
2	Pajak Air Tanah	29,000,000.00	29,580,000.00	30,160,000.00	30,740,000.00	31,320,000.00
3	Pajak Sarang Burung Walet	3,950,000.00	4,029,000.00	4,108,000.00	4,187,000.00	4,266,000.00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,200,000,000.00	1,224,000,000.00	1,248,000,000.00	1,272,000,000.00	1,296,000,000.00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2,300,000,000.00	2,346,000,000.00	2,392,000,000.00	2,438,000,000.00	2,484,000,000.00
6	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2,724,000,000.00	2,778,480,000.00	2,832,960,000.00	2,887,440,000.00	2,941,920,000.00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	8,361,000,000.00	8,528,220,000.00	8,695,440,000.00	8,862,660,000.00	9,029,880,000.00
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1,100,000,000.00	1,122,000,000.00	1,144,000,000.00	1,166,000,000.00	1,188,000,000.00
	PBJT-Tenaga Listrik	7,200,000,000.00	7,344,000,000.00	7,488,000,000.00	7,632,000,000.00	7,776,000,000.00
	PBJT-Hotel	5,000,000.00	5,100,000.00	5,200,000.00	5,300,000.00	5,400,000.00
	PBJT- Parkir	50,000,000.00	51,000,000.00	52,000,000.00	53,000,000.00	54,000,000.00
	PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan	6,000,000.00	6,120,000.00	6,240,000.00	6,360,000.00	6,480,000.00
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5,675,361,285.00	5,788,868,510.70	5,902,375,736.40	6,015,882,962.10	6,129,390,187.80
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3,564,658,020.00	3,635,951,180.40	3,707,244,340.80	3,778,537,501.20	3,849,830,661.60
Total		23,957,969,305.00	24,437,128,691.10	24,916,288,077.20	25,395,447,463.30	25,874,606,849.40

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Seluma merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu- strategis di level internasional, nasional dan regional Bengkulu. Isu Strategis merupakan jangkar (anchor) sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah (compass) yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Seluma pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

a. Permasalahan Internal

- Perlunya peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- Perlunya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi bagi wajib pajak
- Perlu adanya revisi Peraturan Daerah terkait belum terakomodirnya upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah
- Perlunya peningkatan kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia;
- Perlunya pengawasan internal yang berbasis risiko;
- Belum optimalnya penerapan dan evaluasi SOP kepada wajib pajak dengan program penjaminan mutu pelayanan;
- Perlunya peningkatan penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan wajib pajak.

b. Permasalahan Eksternal

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma antara lain sebagai berikut:

- Perlunya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
- Perlunya peningkatan upaya dan kontribusi instansi pemungut Retribusi Daerah dalam pencapaian target;
- Iklim ekonomi yang kurang stabil;
- Belum optimalnya penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan tugas dan fungsinya dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10
(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan dan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kurang optimal	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal	Peraturan perundangan yang belum mengakomodir untuk optimalisasi pemungutan PAD;	Terbitnya UU baru (UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD) yang merubah stuktur PAD di Daerah	Dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan intensif terkait UU HKPD bagi seluruh aparaturnya yang terlibat dalam pemungutan PAD dan mengupdate peraturan daerah agar selaras dengan ketentuan terbaru dalam UU HKPD
			Sistem pelaporan keuangan perpajakan belum sepenuhnya terlaporkan secara realtime;	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah yang belum optimal	Mengembangkan basis data wajib pajak, melakukan pemutakhiran data, meningkatkan pengawasan lapangan dan penegakan hukum, serta memanfaatkan teknologi informasi seperti e-SPTPD, e-

					Billing, dan e-Tax
			Penghindaran terhadap pajak daerah masih cukup tinggi;	Rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak yang tepat waktu;	Menjalankan edukasi publik, membangun komunikasi langsung, dan memberikan insentif atau penghargaan
			Penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kompetensi dan peta jabatan yang dibutuhkan;	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Programer, Penilai, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah serta Juru Sita Pajak Daerah;	Melakukan perekrutan SDM yang sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan kapasitas apparatus, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi
			Sinkronisasi regulasi yang masih kurang antara PD yang bersinggungan;	Belum terbangunnya sistem pengendalian Pajak Daerah dengan baik;	Membangun dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi, membentuk unit pengawasan internal, dan menerapkan dashbor pemantauan real-time
			Belum diterapkannya reward dan punishment sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat untuk memotivasi aparatur;	Sumberdaya aparatur kurang kompeten di bidangnya.	Melakukan penilaian kompetensi secara berkala, membuat program pelatihan dan sertifikasi, dan menerapkan sistem reward

Tabel 2.11
Identifikasi Isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

No.	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Daerah yang belum optimal	PAD belum maksimal	Meningkatnya potensi PAD	Kondisi ekonomi yang stabil
2		Belum tercapainya realisasi pajak daerah sesuai target	Tercapainya target pajak daerah	Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu
3		Adanya tunggakan pajak daerah	Meningkatnya piutang pajak daerah tertagih	Kondisi ekonomi yang stabil
4		Kurangnya kesadaran wajib pajak		
5		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Regulasi dan sistem akuntabilitas kinerja yang handal
6		Belum optimalnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola perangkat daerah	Regulasi dan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang handal
7		Belum optimalnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Regulasi dan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian yang handal
8		Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi umum	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Regulasi dan sistem Pengelolaan administrasi umum yang handal
9		Kemiskinan • Penghapusan Denda Pajak • Stimulus PBB • Pengurangan	Tercapainya target pajak daerah	Regulasi sistem pajak daerah yang handal

		Ketetapan Pajak • Relaksasi Pajak		
10		Birokrasi yang responsif dan adaptif • Program Sambang Kelurahan • Open payment • Pemasangan E-Tax • Rekonsiliasi monev PAD (non budgetair) • ETPD (Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah) • E-SPPT PBB • E-BPHTB (BPHTB online) • Relaksasi Pajak • Gebyar Sadar Pajak • Adaptif Regulasi	Tercapainya target pajak daerah	Regulasi sistem pajak daerah yang handal
11		Daya Saing Sumber Daya Manusi	Tercapainya target pajak daerah	Kondisi ekonomi yang stabil
12		Perlindungan Daya Sosial dan Daya Beli Penghapusan Denda Pajak	Tercapainya target pajak daerah	Kondisi ekonomi yang stabil
13		Kemudahan Berinvestasi dan Pengendalian Inflasi Relaksasi Pajak	Tercapainya target pajak daerah	Regulasi sistem pajak daerah yang handal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 adalah “Terjuwudnya Kabupaten Seluma Emas Berlian (Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan dan Berimana”. Sejalan dengan Visi yang diemban tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Bapenda Kabupaten Seluma adalah “Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah”.

Tujuan Renstra Bapenda Kabupaten Seluma ini sepenuhnya sejalan dengan Misi 3 RPJMD, baik melalui tujuan, sasaran, dan indikator yang dilaksanakan dikarenakan menekankan aspek meningkatkannya pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sasaran ditetapkan sebagai arah kerja yang terukur bagi Bapenda Kabupaten Seluma dalam mendukung pembangunan daerah secara konsisten, efektif, dan berbasis bukti. Sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan, sekaligus memastikan keterkaitan dengan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun sasaran Renstra Bapenda adalah Optimalisasi Penerimaan PAD dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran tersebut mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Maka dari itu, seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai daya saing tinggi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.3 Strategi Perangkat Daerah mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Strategi dan Kebijakan Bapenda Kabupaten Seluma dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah;
- 2) Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah;
- 3) Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dibidang perpajakan;
- 5) Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal pembayaran dan perubahan pajak daerah;
- 6) Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan;
- 7) Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- 8) Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
- 9) Mengupayakan akses telekomunikasi dan informasi melalui kerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika;
- 10) Menyediakan Infrastruktur system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- 11) Menyediakan layanan pengaduan konsumen untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan serta rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi non tunai dengan pemerintah daerah;
- 12) Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat aparat pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai transaksi non tunai serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah; dan
- 13) Melakukan pengawasan pendapatan daerah.

Melalui ketiga strategi tersebut, Kabupaten Seluma diharapkan mampu mengoptimalkan peran sebagai motor penggerak pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas layanan perencanaan.

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.45.0000 - Badan Pendapatan Daerah											
- Meningkatnya nilai investasi	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Rasio PAD (%)	1,36:1,4	1,50:1,55	1,68:1,70	1,75:1,78	1,80:1,9	2:2,05	2,1:2,15	
		Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatkan tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	75,85	75,95	76,05	76,15	76,25	76,35	76,45	

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 2025-2029

Arah kebijakan ini ditetapkan untuk menjadi pedoman operasional bagi Bapenda Kabupaten Seluma dalam melaksanakan strategi dan mencapai sasaran Renstra 2025–2029. Arah kebijakan ini menekankan upaya peningkatan potensi pendaptan asli daerah dan kinerja pelayanan perangkat daerah. Arah kebijakan yang ditetapkan meliputi:

- 1) Inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah;
- 2) Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien;
- 3) Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 4) MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang perpajakan;
- 5) Peningkatan pengawasan melalui pemasangan alat dan sistem di masing-masing obyek/wajib pajak;
- 6) Pelaksanaan bulan panutan dan pajak award;
- 7) Peningkatan Peran PNS dibidang pendapatan;
- 8) Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah;
- 9) Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah;
- 10) Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 11) Peningkatan sarana-prasarana pendukung sesuai kebutuhan.

Dengan penerapan arah kebijakan tersebut, Bapperida Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menjalankan strategi dan program secara efektif, mendukung pencapaian sasaran, serta mewujudkan tujuan Renstra 2025–2029. Untuk lebih jelas, maka strategi dan arah kebijakan dapat kami tampilkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SELUMA EMAS BERLIAN (ELOK, MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN DAN BERIMAN			
MISI : “Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan, dan berkeadilan. ”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Asli Daerah 2. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Meningkatkan Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah melalui pendapatan dan penagihan yang berkelanjutan 2. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Khususnya Wajib Pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
2. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Meningkatkan Koordinasi dengan tim evaluasi SAKIP Kabupaten	1. Melakukan Koordinasi Berkala Dengan Tim Evaluasi Sakip Kabupaten

BAB VI

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021–2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, guna mencapai sasaran tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Bapenda Kabupaten Seluma dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator hasil dari program ini adalah Persentase Capain urusan Pemerintah daerah.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Indikator hasil dari program ini adalah Persentase Capain Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 – KEUANGAN					7.129.015.091,00		7.138.033.132,00		7.347.095.669,00		7.156.088.113,00		7.165.329.979,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.661.318.091,00		5.666.268.230,00		5.871.242.623,00		5.676.126.650,00		5.681.239.795,00	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	75,85	85	85	5.661.318.091,00	85	5.666.268.230,00	85	5.871.242.623,00	85	5.676.126.650,00	85	5.681.239.795,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.467.697.000,00		1.471.764.902,00		1.475.853.046,00		1.479.961.463,00		1.484.090.184,00	
Meningkatnya upaya ekstifikasi dan intentifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	0	0	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	0	0	0	259.980.000,00	0	261.253.902,00	0	262.534.046,00	0	263.820.463,00	0	265.113.184,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya peranan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	0	0	707.717.000,00	0	710.511.000,00	0	713.319.000,00	0	716.141.000,00	0	718.977.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					7129015091.00		7138033132.00		7347095669.00		7156088113.00		7165329979.00	

4.2 Uraian Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta arah kebijakan Renstra Bapenda 2025–2029, ditetapkan sejumlah program dan kegiatan strategis. Program-program ini tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tetapi juga memastikan koordinasi lintas sektor, integrasi data, serta penguatan riset dan inovasi sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Setiap program dirancang agar selaras dengan misi dan sasaran RPJMD. Program serta kegiatan-kegiatan Bapenda Kabupaten Seluma dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam kegiatan tahun 2025-2029 berupa:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk Menyusun perencanaan program kegiatan maupun sub kegiatan agar terstruktur dan terencana dengan baik. Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan optimal dalam hal urusan administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator hasil. Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi keuangan.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan optimal dalam hal urusan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan optimal dalam hal urusan administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah dengan optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah. Indikator hasil kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan optimal di bidang pengadaan jasa. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar dapat menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal. Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sifat kegiatan dari program ini merupakan sarana untuk Mendukung Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kegiatan tahun 2025-2029, yaitu Pengelolaan Pendapatan Daerah Operasional dimana Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan pajak Daerah. Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah Persentase peningkatan potensi PAD, Persentase peningkatan potensi pajak daerah dan Persentase penerimaan pajak daerah.

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.45.0000 - Badan Pendapatan Daerah							
- Meningkatnya nilai investasi	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel				Rasio PAD (%)		
		Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah			Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah (%)		
		Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Meningkatnya laporan keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
--	--	--	--	--	---	---	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya pengadaan BMD sesuai RKUB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya		5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Meningkatnya pelayanan perangkat daerah yang terlayani	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya pengadaan barang sesuai spesifikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Meningkatnya laporan jasa yang dibayarkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Meningkatnya upaya ekstifikasi dan intentifikasi pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

Meningkatnya pengelolaan pendapatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya peranan sistem informasi keuangan berbasis digital		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari uraian program dan kegiatan yang telah ditetapkan, bagian ini memuat rincian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target capaian tahunan, dan pagu indikatif untuk periode tahun 2026–2030. Penyusunan target dan pagu indikatif ini dilakukan dengan prinsip:

1. Konsistensi dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.
2. Keterukuran, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, serta memiliki definisi operasional yang seragam.
3. Efisiensi dan efektivitas pendanaan, di mana pagu indikatif subkegiatan merupakan turunan dari total pagu kegiatan, dan total pagu kegiatan merupakan bagian dari pagu program.
4. Akuntabilitas, dengan menyediakan tolok ukur yang dapat digunakan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Bapenda.

Secara rinci, tabel berikut menyajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Bapenda Kabupaten Seluma, lengkap dengan kinerja, indikator, satuan, kondisi awal (2024), target tahunan, pagu indikatif tahun 2026– 2030.

Sebagai bagian dari perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, telah disusun rencana pendanaan untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam periode tahun 2026–2030.

Perhitungan pagu indikatif dilakukan berdasarkan pendekatan tren penambahan tahunan sebesar 0,49% dari pagu tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja, arah kebijakan fiskal daerah, dan kemampuan keuangan daerah.

Untuk pendanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan APBD Kabupaten Seluma berupa DAU (Dana Alokasi Umum) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 – KEUANGAN				7.129.015.091,00		7.138.033.132,00		7.347.095.669,00		7.156.088.113,00		7.165.329.979,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.661.318.091,00		5.666.268.230,00		5.871.242.623,00		5.676.126.650,00		5.681.239.795,00		
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	75,85	85	5.661.318.091,00	85	5.666.268.230,00	85	5.871.242.623,00	85	5.676.126.650,00	85	5.681.239.795,00	5.02.0.00.0.00.45.00 00 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.000.000,00		45.220.500,00		45.442.080,00		45.640.005,00		45.863.641,00		
Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	45.000.000,00	2	45.220.500,00	2	45.442.080,00	2	45.640.005,00	2	45.863.641,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	11		11		11		11		11			
5.02.01.2.01.0001 – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.049.000,00		10.098.240,00		10.147.721,00		10.197.445,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	11	10.000.000,00	11	10.049.000,00	11	10.098.240,00	11	10.147.721,00	11	10.197.445,00		
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000,00		5.024.500,00		5.049.120,00		5.049.120,00		5.073.861,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	5.000.000,00	4	5.024.500,00	4	5.049.120,00	4	5.049.120,00	4	5.073.861,00		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000,00		30.147.000,00		30.294.720,00		30.443.164,00		30.592.335,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	30.000.000,00	2	30.147.000,00	2	30.294.720,00	2	30.443.164,00	2	30.592.335,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.235.585.636,00		4.235.999.686,00		4.236.415.765,00		4.236.833.882,00		4.237.254.049,00		
Meningkatnya laporan keuangan sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	322	574	4.235.585.636,00	574	4.235.999.686,00	574	4.236.415.765,00	574	4.236.833.882,00	574	4.237.254.049,00		

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.151.085.636,00		4.151.085.636,00		4.151.085.636,00		4.151.085.636,00		4.151.085.636,00				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	322	574	4.151.085.636,00	574	4.151.085.636,00	574	4.151.085.636,00	574	4.151.085.636,00	574	4.151.085.636,00				
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				74.500.000,00		74.865.050,00		75.231.889,00		75.600.525,00		75.970.968,00				
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	74.500.000,00	1	74.865.050,00	1	75.231.889,00	1	75.600.525,00	1	75.970.968,00				
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000,00		10.049.000,00		10.098.240,00		10.147.721,00		10.197.445,00				
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.049.000,00	1	10.098.240,00	1	10.147.721,00	1	10.197.445,00				
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.800.000,00		4.823.520,00		4.847.155,00		4.870.906,00		4.894.774,00				
Meningkatnya pengadaan BMD sesuai RKUB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	4.800.000,00	1	4.823.520,00	1	4.847.155,00	1	4.870.906,00	1	4.894.774,00				
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.800.000,00		4.823.520,00		4.847.155,00		4.870.906,00		4.894.774,00				
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	4.800.000,00	1	4.823.520,00	1	4.847.155,00	1	4.870.906,00	1	4.894.774,00				
5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0				
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0				
Persentase jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya				0		0		0		0		0				
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				619.232.455,00		619.816.694,00		620.403.796,00		620.903.773,00		621.586.644,00				
Meningkatnya pelayanan perangkat daerah yang terlayani	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	619.232.455,00	1	619.816.694,00	1	620.403.796,00	1	620.903.773,00	1	621.586.644,00				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1							

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				104.068.555,00		104.088.491,00		104.108.525,00		104.128.656,00		104.148.887,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	104.068.555,00	1	104.088.491,00	1	104.108.525,00	1	104.128.656,00	1	104.148.887,00		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				149.163.900,00		149.404.803,00		149.646.887,00		149.890.156,00		150.134.618,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	149.163.900,00	1	149.404.803,00	1	149.646.887,00	1	149.890.156,00	1	150.134.618,00		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				112.500.000,00		112.561.250,00		112.622.800,00		112.684.652,00		112.746.807,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	112.500.000,00	1	112.561.250,00	1	112.622.800,00	1	112.684.652,00	1	112.746.807,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000,00		15.073.500,00		15.147.360,00		15.221.582,00		15.296.168,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000,00	1	15.073.500,00	1	15.147.360,00	1	15.221.582,00	1	15.296.168,00		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.500.000,00		7.536.750,00		7.573.680,00		7.610.791,00		7.648.084,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	7.500.000,00	1	7.536.750,00	1	7.573.680,00	1	7.610.791,00	1	7.648.084,00		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				109.000.000,00		109.044.100,00		109.088.416,00		109.132.949,00		109.177.700,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	109.000.000,00	4	109.044.100,00	4	109.088.416,00	4	109.132.949,00	4	109.177.700,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.000.000,00		122.107.800,00		122.216.128,00		122.234.987,00		122.434.380,00		

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	122.000.000,00	4	122.107.800,00	4	122.216.128,00	4	122.234.987,00	4	122.434.380,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				415.000.000,00		417.033.500,00		619.076.963,00		421.130.441,00		423.193.981,00		
Meningkatnya pengadaan barang sesuai spesifikasi	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1	415.000.000,00	1	417.033.500,00	1	619.076.963,00	1	421.130.441,00	1	423.193.981,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		50.245.000,00		50.491.200,00		50.738.607,00		50.987.227,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.245.000,00	1	50.491.200,00	1	50.738.607,00	1	50.987.227,00		
5.02.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000,00		45.220.500,00		45.442.080,00		45.664.747,00		45.888.504,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	45.000.000,00	1	45.220.500,00	1	45.442.080,00	1	45.664.747,00	1	45.888.504,00		
5.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				320.000.000,00		321.568.000,00		523.143.683,00		324.727.087,00		326.318.250,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1	320.000.000,00	1	321.568.000,00	1	523.143.683,00	1	324.727.087,00	1	326.318.250,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				221.700.000,00		222.786.330,00		223.877.983,00		224.974.985,00		226.077.362,00		
Meningkatnya laporan jasa yang dibayarkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	221.700.000,00	4	222.786.330,00	4	223.877.983,00	4	224.974.985,00	4	226.077.362,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4					
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.700.000,00		7.737.730,00		7.775.645,00		7.813.746,00		7.852.033,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	7.700.000,00	4	7.737.730,00	4	7.775.645,00	4	7.813.746,00	4	7.852.033,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.000.000,00		10.049.000,00		10.098.240,00		10.147.721,00		10.197.445,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	10.000.000,00	4	10.049.000,00	4	10.098.240,00	4	10.147.721,00	4	10.197.445,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				204.000.000,00		204.999.600,00		206.004.098,00		207.013.518,00		208.027.884,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	204.000.000,00	4	204.999.600,00	4	206.004.098,00	4	207.013.518,00	4	208.027.884,00		

5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.000.000,00		120.588.000,00		121.178.881,00		121.772.658,00		122.369.344,00		
Meningkatnya barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	120.000.000,00	20	120.588.000,00	20	121.178.881,00	20	121.772.658,00	20	122.369.344,00		
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				120.000.000,00		120.588.000,00		121.178.881,00		121.772.658,00		122.369.344,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	120.000.000,00	20	120.588.000,00	20	121.178.881,00	20	121.772.658,00	20	122.369.344,00		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.467.697.000,00		1.471.764.902,00		1.475.853.046,00		1.479.961.463,00		1.484.090.184,00		
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	0	0	259.980.000,00	0	261.253.902,00	0	262.534.046,00	0	263.820.463,00	0	265.113.184,00	5.02.0.00.0.00.45.00 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.467.697.000,00		1.471.764.902,00		1.475.853.046,00		1.479.961.463,00		1.484.090.184,00		
Analisa dan pengembangan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	259.980.000,00	1	261.253.902,00	1	262.534.046,00	1	263.820.463,00	1	265.113.184,00		
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				18.480.000,00		18.570.552,00		18.661.548,00		18.752.989,00		18.844.879,00		

Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	18.480.000,00	1	18.570.552,00	1	18.661.548,00	1	18.752.989,00	1	18.844.879,00		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10.500.000,00		10.551.450,00		10.603.152,00		10.655.108,00		10.707.318,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	1	10.500.000,00	1	10.551.450,00	1	10.603.152,00	1	10.655.108,00	1	10.707.318,00		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				75.000.000,00		75.367.500,00		75.736.801,00		76.107.911,00		76.480.840,00		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	75.367.500,00	1	75.736.801,00	1	76.107.911,00	1	76.480.840,00		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12.000.000,00		12.058.800,00		12.117.888,00		12.177.266,00		12.236.934,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1	12.000.000,00	1	12.058.800,00	1	12.117.888,00	1	12.177.266,00	1	12.236.934,00		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				15.000.000,00		15.073.500,00		15.147.360,00		15.221.582,00		15.296.168,00		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.073.500,00	1	15.147.360,00	1	15.221.582,00	1	15.296.168,00		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9.000.000,00		9.044.100,00		9.088.416,00		9.132.949,00		9.177.701,00		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1	1	9.000.000,00	1	9.044.100,00	1	9.088.416,00	1	9.132.949,00	1	9.177.701,00		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				20.000.000,00		20.098.000,00		20.196.480,00		20.295.443,00		20.394.891,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.098.000,00	1	20.196.480,00	1	20.295.443,00	1	20.394.891,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				100.000.000,00		100.490.000,00		100.982.401,00		101.477.215,00		101.974.453,00		
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.490.000,00	1	100.982.401,00	1	101.477.215,00	1	101.974.453,00		
Meningkatnya peranan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	0	707.717.000,00	0	710.511.000,00	0	713.319.000,00	0	716.141.000,00	0	718.977.000,00		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.467.697.000,00		1.471.764.902,00		1.475.853.046,00		1.479.961.463,00		1.484.090.184,00		
Meningkatnya pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	0	3.000	707.717.000,00	3.000	710.511.000,00	3.000	713.319.000,00	3.000	716.141.000,00	3.000	718.977.000,00		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			

	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	0	3.000	300.000.000,00	3.000	300.000.000,00	3.000	300.000.000,00	3.000	300.000.000,00	3.000	300.000.000,00		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				207.717.000,00		210.511.000,00		213.319.000,00		216.141.000,00		218.977.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	4	4	207.717.000,00	4	210.511.000,00	4	213.319.000,00	4	216.141.000,00	4	218.977.000,00		
Meningkatnya upaya ekstifikasi dan identifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	0	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.467.697.000,00		1.471.764.902,00		1.475.853.046,00		1.479.961.463,00		1.484.090.184,00		
Meningkatnya pengelolaan pendapatan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	0	2.000	500.000.000,00	2.000	500.000.000,00	2.000	500.000.000,00	2.000	500.000.000,00	2.000	500.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	0	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	0	2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00		

4.4. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kegiatan prioritas dalam Program Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma memiliki peran penting dalam menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sub kegiatan prioritas Bapenda dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup sub kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat perencanaan strategis dan evaluasi kinerja perangkat daerah, antara lain:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat tersusun sehingga setiap program terencana dan tersusun dengan baik

- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dapat tersusun sehingga tercipta pola kerja yang lebih baik dan menunjang kinerja perangkat daerah yang lebih maju

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah Operasional

Kegiatan ini difokuskan pada optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah. Sub kegiatan yang termasuk dalam kategori ini meliputi:

- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah tersedianya peraturan pajak dan retribusi daerah

- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah aplikasi pajak dan retribusi daerah yang ditingkatkan sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

- c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah potensi obyek pajak daerah sehingga mampu tercapainya potensi dan data pajak daerah.

- d. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah potensi obyek pajak PBB-P2 dan BPHTB sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

e. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah jumlah ketetapan pajak daerah.

f. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang terlayani sehingga dapat di ukur optimalnya pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah.

g. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah evaluasi dan laporan pajak dan retribusi daerah sehingga terdapat ketepatan data pelaporan pajak.

h. Penagihan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerimaan Pajak daerah sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

i. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang diperiksa sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.45.0000 - Badan Pendapatan Daerah				
1.	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya peranan sistem informasi keuangan berbasis digital	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya upaya ekstifikasi dan identifikasi pendapatan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
		Meningkatnya upaya ekstifikasi dan identifikasi pendapatan	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
		Meningkatnya upaya ekstifikasi dan identifikasi pendapatan	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
		Meningkatnya peranan sistem informasi keuangan berbasis digital	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
		Meningkatnya upaya ekstifikasi dan identifikasi pendapatan	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
		Meningkatnya peranan sistem informasi keuangan berbasis digital	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Meningkatnya peranan sistem informasi keuangan berbasis digital	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bapenda Kabupaten Seluma 2025–2029 sangat ditentukan oleh sejauh mana perangkat daerah mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan alat ukur yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik. Alat ukur tersebut diwujudkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU Bapenda Kabupaten Seluma berfungsi sebagai indikator makro yang menunjukkan capaian strategis lembaga dalam mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. IKU ini bersifat representatif karena mengukur hasil (outcome) dari pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Bapperida, bukan hanya output administratif semata. Penetapan IKU mengacu pada beberapa prinsip:

1. Relevansi – indikator dipilih sesuai dengan mandat Bapperida dalam bidang perencanaan pembangunan, riset, inovasi, serta tata kelola perangkat daerah.
2. Keterukuran – indikator dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan data yang tersedia dan dapat diverifikasi.
3. Konsistensi – indikator selaras dengan indikator tujuan dan sasaran RPJMD serta indikator kinerja pembangunan nasional.
4. Keterpaduan – indikator mencerminkan keterhubungan antarprogram, sehingga capaian setiap kegiatan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis Bapenda.

Sejalan dengan hal tersebut, IKU Bapenda Kabupaten Seluma 2025–2029 ditetapkan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran Renstra, yang sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja jangka menengah.

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.45.0000 – Badan Pendapatan Daerah									
2.	Rasio PAD	%	1.36:1.4	1.50:1.55	1.68:1.70	1.75:1.78	1.80:1.9	2:2.05	2.1:2.15	
3.	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	75,85	75,95	76,05	76,15	76,25	76,35	76,45	
4.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada setiap perangkat daerah. Melalui IKK, dapat dilakukan pemantauan sejauh mana pelayanan publik dan kinerja urusan pemerintahan daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan posisi tersebut, maka periode 2025-2029, target kinerja Bapenda dapat dinyatakan dalam bentuk karena memiliki IKK tersendiri.

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 – KEUANGAN										
2.	Rasio PAD	Positif	%	1.36:1.4	1.50:1.55	1.68:1.70	1.75:1.78	1.80:1.9	2:2.05	2.1:2.15	
3.	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Positif	Nilai	75,85	75,95	76,05	76,15	76,25	76,35	76,45	
4.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran RENSTRA ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses bisnis.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan PendapSTatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD Perubahan Tahun 2025-2029 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Seluma. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma serta rencana-rencana kerja bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma.

Melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), *stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Selumajuga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Selumakita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Seluma, Oktober 2025
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Seluma



SUPARJOH, S.SOS., M.Si.
NIP. 197008061997031005